

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Konflik bersenjata di Yaman sejak tahun 2015 merupakan salah satu konflik intra-negara paling kompleks dan berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Kompleksitas konflik ini tercermin dari tingginya intensitas kekerasan serta keterlibatan berbagai aktor domestik dan regional dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Seiring perkembangannya, konflik Yaman mengalami transformasi dari krisis politik domestik menjadi konflik bersenjata yang terregionalisasi, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut menjadikan konflik Yaman sebagai isu yang melampaui batas nasional dan memerlukan keterlibatan aktor-aktor regional dalam upaya penyelesaiannya. Helen Lackner menjelaskan bahwa kompleksitas konflik Yaman tidak hanya terletak pada intensitas kekerasan, tetapi juga pada keterkaitan berbagai dimensi konflik yang melibatkan aktor domestik dan regional dengan kepentingan yang saling bertabrakan (Lackner, 2019).

Akar konflik Yaman dapat ditelusuri pada kegagalan proses transisi politik pasca-Arab Spring tahun 2011. Kejatuhan Presiden Ali Abdullah Saleh membuka peluang reformasi politik, namun transisi yang berlangsung tidak mampu menghasilkan konsensus politik yang stabil dan inklusif. Lemahnya kapasitas institusi negara serta fragmentasi elite politik menciptakan kondisi struktural yang rapuh dan mempercepat melemahnya otoritas pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, kelompok Houthi muncul sebagai aktor non-negara yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik dan militer sehingga mendorong eskalasi

konflik menjadi konfrontasi bersenjata terbuka. Helen Lackner menegaskan bahwa kegagalan transisi politik di Yaman merupakan refleksi dari kegagalan struktural negara dalam mengelola perubahan politik pascaotoritarianisme (Lackner, 2019).

Pada fase awal krisis, penyelesaian konflik Yaman masih dipandang memungkinkan melalui mekanisme politik internal tanpa keterlibatan pihak ketiga. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa konflik domestik dapat dikelola melalui dialog politik dan kompromi antar elite nasional, salah satunya .melalui National Dialogue Conference (NDC) periode 2013–2014. Forum ini dirancang sebagai mekanisme dialog nasional yang inklusif untuk merumuskan tatanan politik baru pasca-Arab Spring. Namun, perbedaan mendasar mengenai struktur negara dan pembagian kekuasaan serta absennya mekanisme implementasi menyebabkan kesepakatan NDC tidak memiliki legitimasi politik yang kuat. Paul Salisbury menjelaskan bahwa kegagalan NDC mencerminkan keterbatasan dialog politik dalam konflik yang sangat terfragmentasi, di mana ketimpangan posisi tawar dan rendahnya kepercayaan politik melemahkan efektivitas forum dialog (Salisbury P. , 2017).

Kegagalan National Dialogue Conference dan berbagai dialog internal lanjutan menunjukkan keterbatasan pendekatan resolusi konflik berbasis mekanisme domestik di Yaman. Lemahnya komitmen politik para pihak menyebabkan kesepakatan yang telah dicapai tidak memiliki daya ikat yang kuat dalam praktik. Selain itu, absennya mekanisme penegakan kesepakatan memperbesar risiko pelanggaran oleh aktor bersenjata yang tidak puas dengan hasil dialog. Fragmentasi aktor konflik yang semakin kompleks turut memperumit proses

penyelesaian politik. Ketimpangan posisi tawar antar aktor dan rendahnya kepercayaan politik melemahkan efektivitas forum dialog yang ada. Dalam situasi tersebut, jalur resolusi konflik internal kehilangan efektivitasnya sebagai sarana untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Salisbury menegaskan bahwa absennya mekanisme yang mampu menjamin implementasi kesepakatan secara konsisten menjadi salah satu faktor utama kegagalan upaya dialog internal di Yaman (Salisbury P. , 2017).

Sejak tahun 2015, konflik Yaman mengalami eskalasi yang lebih luas dengan keterlibatan aktor-aktor regional yang memberikan dukungan politik dan militer kepada pihak-pihak yang bertikai. Intervensi eksternal mempercepat transformasi konflik domestik menjadi konflik terregionalisasi dengan implikasi geopolitik yang lebih luas. Dalam konteks ini, kalkulasi strategis para pihak semakin didominasi oleh pertimbangan militer daripada kompromi politik. Akibatnya, ruang kompromi politik menjadi semakin sempit dan prospek penyelesaian konflik melalui dialog langsung semakin terbatas. Keterlibatan aktor eksternal juga memperkuat ketergantungan para pihak pada dukungan militer dan mengurangi insentif untuk mencapai kompromi politik. Situasi ini menyebabkan proses dialog menjadi tidak efektif sebagai sarana penyelesaian konflik. Kondisi tersebut mendorong pencarian alternatif penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi pihak ketiga yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan para pihak. Lackner menjelaskan bahwa regionalisasi konflik Yaman mengubah dinamika konflik secara fundamental, di mana penyelesaian konflik tidak lagi dapat dilepaskan dari kepentingan strategis aktor-aktor regional (Lackner, 2019).

Dalam literatur resolusi konflik kontemporer, konflik intra-negara modern dipahami sebagai fenomena yang bersifat multidimensional. Konflik tidak hanya didorong oleh faktor politik semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dimensi sosial, ekonomi, dan regional yang saling terkait dan membentuk kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, resolusi konflik tidak dapat hanya berfokus pada kesepakatan formal atau gencatan senjata temporer. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar struktural konflik yang melatarbelakangi kekerasan. Pendekatan tersebut harus mampu mentransformasi hubungan antar pihak dari pola konfrontatif menuju pola yang lebih konstruktif. Keberhasilan resolusi konflik dengan demikian bergantung pada perubahan jangka panjang yang mendasar, bukan hanya stabilisasi keamanan sesaat. Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall dalam buku *Contemporary Conflict Resolution* (2016) menekankan bahwa pendekatan komprehensif dalam resolusi konflik harus mampu menyentuh berbagai dimensi konflik secara bersamaan untuk menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2016).

Dalam konflik yang kompleks dan melibatkan banyak aktor, mediasi sering menghasilkan hasil yang parsial atau tidak berkelanjutan. Kondisi ini terutama terjadi ketika konflik belum mencapai tahap kematangan (*ripeness*), yaitu situasi ketika para pihak belum melihat penyelesaian damai sebagai pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan kelanjutan konflik bersenjata. Mediasi yang tidak disertai perubahan struktural atau penyelesaian akar konflik cenderung menghasilkan kesepakatan yang rapuh dan mudah runtuh ketika terjadi eskalasi kekerasan. Allard Duursma menegaskan bahwa faktor *timing* dan kematangan

konflik merupakan unsur krusial yang memengaruhi keberhasilan mediasi (Duursma, 2020). Tantangan mediasi menjadi semakin kompleks ketika mediator berasal dari organisasi regional yang sering menghadapi dilema antara tuntutan netralitas dan kepentingan politik negara anggotanya. Clayton, Duursma, dan Mason menjelaskan bahwa keterlibatan negara anggota dalam konflik dapat memengaruhi persepsi netralitas dan kredibilitas organisasi regional sebagai mediator (Clayton, Duursma, & Mason, 2023).

Dalam konteks Timur Tengah, Liga Arab merupakan salah satu organisasi regional yang telah mengambil peran dalam berbagai konflik kawasan, termasuk konflik Yaman. Namun, Liga Arab menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan akibat fragmentasi kepentingan negara anggotanya. Perbedaan kepentingan strategis, ideologis, dan geopolitik antar negara anggota menghambat pembentukan sikap kolektif yang konsisten dalam merespons konflik. Keterbatasan ini diperparah oleh keterlibatan langsung beberapa negara anggota dalam konflik yang berusaha dimediasi oleh Liga Arab itu sendiri. Akibatnya, peran Liga Arab dalam penyelesaian konflik cenderung bersifat politis dan normatif, belum sepenuhnya mencerminkan fungsi mediasi yang netral dan efektif. Organisasi ini lebih sering bertindak sebagai platform diplomasi politik daripada mediator independen yang mampu memfasilitasi dialog konstruktif antar pihak yang bertikai. Marc Lynch dalam bukunya *The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East* (2016) menjelaskan bahwa fragmentasi kepentingan negara anggota Liga Arab menghambat pembentukan sikap kolektif yang konsisten,

sehingga peran organisasi ini dalam penyelesaian konflik cenderung bersifat politis dan normatif (Lynch, 2016).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konflik Yaman dan upaya penyelesaiannya, kajian yang secara khusus mengevaluasi hasil mediasi Liga Arab masih menunjukkan keterbatasan analitis. Sebagian besar penelitian menempatkan peran Liga Arab dalam kerangka dinamika geopolitik kawasan atau sebagai bagian dari intervensi politik negara-negara anggotanya. Akibatnya, peran mediasi Liga Arab sering dipahami secara deskriptif tanpa evaluasi sistematis terhadap kontribusinya dalam mengubah dinamika konflik. Padahal, analisis berbasis kerangka resolusi konflik penting untuk menilai apakah mediasi mampu menghasilkan penerimaan antar pihak, kesepakatan yang bermakna, serta penghentian kekerasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi upaya mediasi Liga Arab dalam konflik Yaman dengan menggunakan kerangka teori resolusi konflik sebagai alat analisis utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antara proses mediasi organisasi regional dan capaian resolusi konflik secara substantif.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana kegagalan mediasi Liga Arab dalam konflik Yaman periode 2015–2024?

## **1.3. Tujuan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, serta untuk memberikan

sumbangsih ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan bagi masyarakat umum maupun akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik Yaman pada periode 2015–2024 sebagai konteks yang melatarbelakangi keterlibatan Liga Arab dalam upaya penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses serta bentuk keterlibatan Liga Arab dalam menjalankan peran mediasi, termasuk pendekatan dan mekanisme yang digunakan dalam upaya meredakan konflik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh Liga Arab dengan menggunakan konsep mediasi pihak ketiga sebagai argumen pendukung guna memahami dinamika dan karakteristik mediasi dalam konflik Yaman. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya mediasi Liga Arab berkontribusi terhadap pengelolaan dan resolusi konflik Yaman berdasarkan kerangka resolusi konflik.

## **1.4. Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Mediasi dalam Resolusi Konflik**

Teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Peter Wallensteen memandang resolusi konflik sebagai suatu kondisi ketika pihak-pihak yang berkonflik berhasil menemukan solusi terhadap inkompatibilitas kepentingan yang mereka hadapi secara berkelanjutan. Dalam pengertian ini, resolusi konflik tidak hanya dimaknai sebagai berhentinya kekerasan dalam jangka pendek, melainkan mencerminkan perubahan yang lebih mendasar dalam hubungan antar pihak sehingga konflik tidak kembali berulang. Dengan demikian, resolusi konflik menekankan transformasi hubungan politik dan sosial, bukan sekadar pengelolaan

konflik atau pengendalian kekerasan secara temporer. Pendekatan Wallensteen berangkat dari pemahaman bahwa konflik bersenjata muncul akibat adanya inkompatibilitas kepentingan yang tidak terselesaikan, baik terkait dengan kekuasaan, legitimasi politik, identitas, maupun distribusi sumber daya. Oleh karena itu, resolusi konflik mensyaratkan adanya proses yang mampu mengatasi sumber-sumber konflik tersebut secara substantif. Resolusi konflik tidak cukup dicapai melalui stabilisasi keamanan semata, tetapi memerlukan perubahan pola interaksi antar pihak yang sebelumnya didominasi oleh kekerasan dan ketidakpercayaan (Wallensteen, 2019).

Dalam praktik penyelesaian konflik, resolusi konflik dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, seperti negosiasi langsung, dialog politik, fasilitasi pihak ketiga, maupun mediasi. Mekanisme-mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong para pihak keluar dari kebuntuan konflik dan mencapai solusi damai. Namun, efektivitas setiap mekanisme sangat bergantung pada konteks konflik, konfigurasi aktor, serta dinamika kekuasaan yang menyertainya. Ketika negosiasi langsung dan mekanisme internal tidak lagi efektif, keterlibatan pihak ketiga melalui mediasi menjadi salah satu alternatif yang sering digunakan.

Menurut Wallensteen, keberhasilan resolusi konflik dapat diidentifikasi melalui pencapaian tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu penerimaan terhadap eksistensi pihak lain, kesepakatan, dan penghentian kekerasan. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang menentukan keberlanjutan perdamaian. Ketiadaan salah satu elemen akan membuat resolusi konflik menjadi tidak lengkap dan rentan mengalami kemunduran. Oleh

karena itu, resolusi konflik hanya dapat dikatakan berhasil apabila ketiga elemen tersebut tercapai secara bersamaan dan saling memperkuat (Wallensteen, 2019).

Elemen pertama adalah penerimaan terhadap eksistensi pihak lain. Elemen ini merujuk pada pengakuan terhadap keberadaan dan legitimasi masing-masing pihak yang berkonflik sebagai aktor yang sah. Penerimaan eksistensi menjadi fondasi awal bagi terbangunnya dialog dan interaksi politik yang lebih konstruktif. Tanpa adanya pengakuan mutual, hubungan antar pihak akan tetap berada dalam pola zero-sum, di mana keberadaan pihak lain dipandang sebagai ancaman yang harus dieliminasi, bukan sebagai mitra dialog. Wallensteen menegaskan bahwa pengakuan terhadap eksistensi pihak lain tidak selalu berarti persetujuan terhadap tuntutan politik yang diajukan, melainkan pengakuan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik dan tidak dapat disingkirkan melalui kekerasan. Penerimaan eksistensi menciptakan landasan psikologis dan politik bagi transformasi konflik. Tanpa fondasi ini, kesepakatan politik yang dicapai cenderung bersifat rapuh dan mudah dilanggar (Wallensteen, 2019).

Elemen kedua adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kesepakatan tidak hanya dipahami sebagai perjanjian formal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai. Dalam kerangka Wallensteen, kesepakatan yang berkontribusi pada resolusi konflik harus menyentuh substansi konflik, melibatkan seluruh aktor kunci, serta dilengkapi dengan mekanisme implementasi yang jelas dan realistis. Kesepakatan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut berpotensi gagal mengubah dinamika konflik secara berkelanjutan (Wallensteen, 2019).

Elemen ketiga adalah penghentian kekerasan. Penghentian atau penurunan signifikan kekerasan bersenjata merupakan indikator penting dari keberhasilan resolusi konflik. Namun, Wallensteen menekankan bahwa penghentian kekerasan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui gencatan senjata jangka pendek. Penghentian kekerasan yang stabil mensyaratkan perubahan orientasi para pihak dari penggunaan kekuatan militer menuju penyelesaian konflik melalui mekanisme politik dan dialog (Wallensteen, 2019).

Ketiga elemen resolusi konflik tersebut memiliki hubungan yang saling memperkuat. Penerimaan eksistensi pihak lain membuka ruang bagi tercapainya kesepakatan, kesepakatan yang inklusif menciptakan dasar bagi penghentian kekerasan, dan penghentian kekerasan yang stabil memperkuat kepercayaan antar pihak. Kegagalan dalam mencapai salah satu elemen akan melemahkan keseluruhan proses resolusi konflik. Dalam kerangka tersebut, mediasi dipahami sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik yang dapat memengaruhi tercapai atau tidaknya ketiga elemen resolusi konflik. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang berperan memfasilitasi komunikasi, menjembatani perbedaan kepentingan, serta membantu para pihak keluar dari kebuntuan konflik. Mediasi tidak secara otomatis menghasilkan resolusi konflik, tetapi berpotensi menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi tercapainya penerimaan mutual, kesepakatan politik, dan penghentian kekerasan.

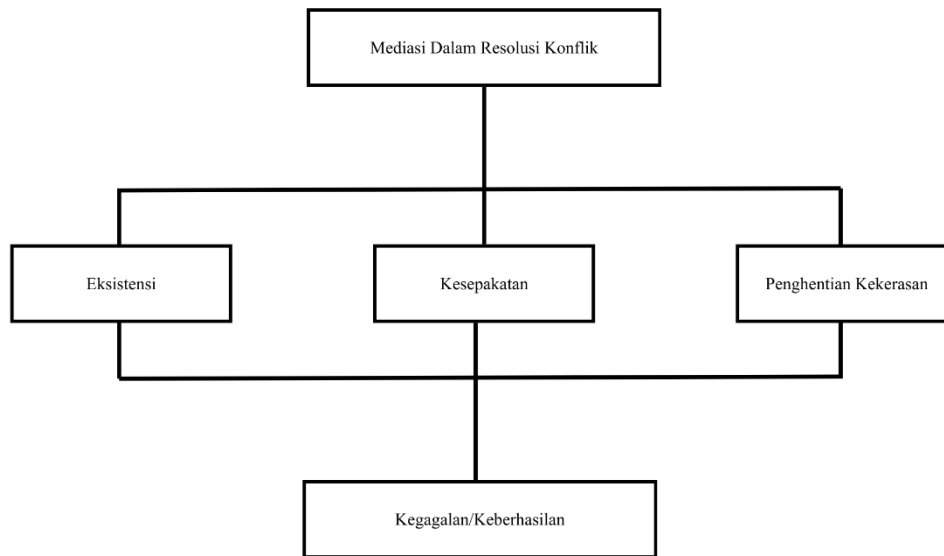
Literatur mediasi internasional menekankan bahwa efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kualitas proses mediasi itu sendiri. Persepsi para pihak terhadap netralitas dan kredibilitas mediator menjadi faktor kunci. Mediator yang

dipersepsikan netral dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam konflik cenderung lebih mudah diterima oleh seluruh pihak, sehingga memiliki ruang yang lebih besar untuk memfasilitasi dialog yang inklusif. Sebaliknya, mediator yang dipersepsikan berpihak akan kesulitan membangun kepercayaan dan memengaruhi para pihak secara konstruktif (Bercovitch & Jackson, 2009).

Selain netralitas, kredibilitas mediator juga berkaitan dengan legitimasi dan kapasitasnya dalam menjangkau seluruh aktor kunci. Mediator yang memiliki legitimasi politik dan akses yang merata cenderung lebih efektif dalam mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses mediasi. Keterbatasan akses atau eksklusivitas proses mediasi akan mengurangi peluang tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dalam kerangka resolusi konflik Wallensteen, mediasi tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang kualitas pelaksanaannya menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tiga elemen resolusi konflik. Mediasi yang dijalankan secara inklusif, kredibel, dan dipersepsikan netral memiliki potensi untuk mendukung transformasi konflik secara berkelanjutan. Sebaliknya, mediasi yang bermasalah dari sisi proses berisiko hanya menghasilkan output prosedural tanpa outcome substantif yang mampu mengubah dinamika konflik.

### **1.5. Sintesa Pemikiran**

#### **Bagan Sintesa Pemikiran**



**Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran**

Sumber: (Wallensteen, 2019)

Berdasarkan kerangka teori resolusi konflik Peter Wallensteen, resolusi konflik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila tiga elemen utama terpenuhi, yaitu penerimaan terhadap eksistensi pihak lain, kesepakatan, dan penghentian kekerasan (Wallensteen, 2019). Ketiga elemen tersebut digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana mediasi Liga Arab berkontribusi terhadap resolusi konflik Yaman. Penerimaan eksistensi menjadi prasyarat awal bagi terciptanya dialog yang konstruktif, sementara kesepakatan yang inklusif menjadi indikator adanya komitmen penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya, penghentian kekerasan digunakan sebagai indikator perubahan nyata dalam dinamika konflik di lapangan. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini mengevaluasi apakah mediasi Liga Arab mampu mendorong tercapainya ketiga elemen resolusi konflik secara berkelanjutan.

## **I.6. Argumentasi Utama**

Berdasarkan kerangka teori resolusi konflik Peter Wallensteen, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan mediasi tidak dapat dinilai semata-mata dari keberlangsungan dialog atau tercapainya kesepakatan formal, melainkan dari sejauh mana mediasi mampu mendorong tercapainya tiga elemen resolusi konflik, yaitu penerimaan terhadap eksistensi pihak lain, kesepakatan yang bermakna, dan penghentian kekerasan secara berkelanjutan (Wallensteen, 2019). Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan menentukan arah penyelesaian konflik secara keseluruhan. Dalam konteks konflik Yaman, upaya mediasi Liga Arab menunjukkan bahwa proses dialog pernah terbuka, namun belum menghasilkan kesepakatan substantif yang diakui dan dijalankan oleh seluruh pihak. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya pengakuan mutual antar aktor konflik serta berlanjutnya kekerasan di lapangan. Dengan demikian, mediasi Liga Arab dinilai belum mampu mendorong tercapainya ketiga elemen resolusi konflik secara bersamaan.

Pada elemen pertama, mediasi Liga Arab belum mampu mendorong pengakuan mutual yang setara antara pihak-pihak yang berkonflik. Liga Arab tidak memposisikan Houthi sebagai pihak *legitimate* dalam dialog politik—sehingga menghambat dialog inklusif dan memperkuat pola hubungan *zero-sum*. Pada elemen kedua, meskipun mediasi Liga Arab menghasilkan sejumlah kesepakatan formal, kesepakatan tersebut tidak inklusif dan mengalami kendala implementasi serius. Pada elemen ketiga, mediasi Liga Arab belum menghasilkan penurunan kekerasan yang berkelanjutan.

## **1.7. Metodologi Pengumpulan dan Analisis Data**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses serta dinamika upaya mediasi yang dilakukan oleh Liga Arab dalam konflik Yaman periode 2015–2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif berdasarkan konteks dan makna, tanpa menggunakan pengukuran numerik atau statistik (Moleong, 2018).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis dan faktual peran serta bentuk keterlibatan Liga Arab dalam konflik Yaman. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada penggambaran realitas empiris sebagaimana tercermin dalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Nazir, 2009).

### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini difokuskan pada upaya mediasi yang dilakukan oleh Liga Arab dalam konflik Yaman pada periode 2015–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada dimulainya eskalasi konflik Yaman secara signifikan serta meningkatnya keterlibatan aktor regional, termasuk Liga Arab, dalam berbagai inisiatif politik dan diplomatik terkait konflik tersebut. Secara substantif, penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai proses, bentuk, dan dinamika mediasi Liga Arab, tanpa membahas secara mendalam seluruh aspek konflik Yaman. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tetap fokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga terkait, serta pemberitaan media internasional yang relevan dengan konflik Yaman dan peran Liga Arab. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Data yang dikumpulkan selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber guna mendukung analisis penelitian secara objektif dan sistematis (Moleong, 2018).

### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menghubungkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami pola, dinamika, serta konteks upaya mediasi Liga Arab dalam konflik Yaman. Selanjutnya, hasil analisis data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran Liga Arab serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan upaya mediasi tersebut (Moleong, 2018).

## **1.8. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks konflik Yaman dan urgensi kajian terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh Liga Arab. Bab ini

juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai landasan awal penelitian.

**BAB II: ANALISIS KEGAGALAN MEDIASI LIGA ARAB DALAM PENERIMAAN EKSISTENSI DAN KESEPAKATAN**

**BAB III: ANALISIS KEGAGALAN MEDIASI LIGA ARAB DALAM PENGHENTIAN KEKERASAN**

**BAB IV: PENUTUP**